

IMPLEMENTASI KONSEP BLUE ECONOMY DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA PESISIR BERKELANJUTAN DI PULAU GILI GEDE

Ika Wijayanti*, Lalu Wirasapta Karyadi, Farida Hilmi
Prodi Sosiologi Universitas Mataram

Alamat korespondensi : ikawijayanti@unram.ac.id

ABSTRAK

Konsep blue economy telah diaplikasikan di Gili Gede yang terintegrasi pada sektor pariwisata dalam pengelolaan sumberdaya lokal secara inklusif, eksplorasi potensi wisata berkonsep konservasi, dan mitigasi bencana. Permasalahan yang dihadapi antara lain belum semua pihak siap dengan konsep blue economy, konsep ini baru diterapkan dalam bidang konservasi untuk mendukung pariwisata pesisir dan pelestarian ekosistem laut, belum mengarah pada penggunaan energi terbarukan. Sinergitas blue economy dianalisis dalam perspektif masyarakat, stake holder dan pelaku usaha wisata. Kajian blue economy penting secara sosiologis karena korelasi antara manusia dengan kelautan merupakan dua dimensi yang tidak bisa dipisahkan. Pertumbuhan ekonomi biru mendukung pertumbuhan berkelanjutan sektor maritim dan kelautan karena lautan dan laut adalah mesin ekonomi global dan memiliki potensi besar untuk pertumbuhan dan inovasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi ekonomi biru untuk mendukung pariwisata yang berkelanjutan di Desa Gili Gede Indah. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan luaran umum yang ditargetkan adalah dalam penelitian ini ditemukan informasi mengenai kebijakan dan penerapan blue economy dalam pengembangan wisata bahari dan pesisir, kegiatan blue economy yang dilakukan oleh penggiat wisata, masyarakat dan pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan penerapan Blue Economy di Gili Gede masih menghadapi berbagai kendala yang mencerminkan adanya gap antara konsep dan praktik lapangan. Sosialisasi dan pengawasan terhadap larangan penangkapan ikan belum merata, sehingga masih ada nelayan dari luar desa yang melanggar zona perlindungan. Selain itu, manajemen sampah di tingkat masyarakat belum optimal karena belum tersedianya sistem pengelolaan terpadu; sebagian warga masih membakar sampah atau membuangnya di lubang-lubang tanah, yang berpotensi mencemari lingkungan. Ketimpangan kapasitas antara masyarakat dengan pelaku usaha wisata juga terlihat, di mana beberapa hotel telah menerapkan standar pengelolaan yang baik, sementara warga masih terkendala fasilitas, edukasi, dan dukungan infrastruktur.

Kata-kata kunci: implementasi, blue economy, wisata pesisir, berkelanjutan

ABSTRACT

The concept of the blue economy has been applied in Gili Gede, integrated into the tourism sector for inclusive local resource management, exploration of conservation-based tourism potential, and disaster mitigation. The problems faced include that not all parties are ready for the blue economy concept, this concept is only recently being applied in the field of conservation to support coastal tourism and marine ecosystem preservation, and it has not yet led to the use of renewable energy. The synergy of the blue economy is analyzed from the perspective of society, stakeholders, and tourism business operators. The study of the blue economy is sociologically important because the correlation between humans and the ocean is an inseparable two-dimensional relationship. Blue economic growth supports the sustainable growth of the maritime and marine sectors because oceans and seas are global economic

engines and have great potential for growth and innovation. This research aims to examine the implementation of the blue economy to support sustainable tourism in Gili Gede Indah Village. The method used in this research is qualitative with a case study approach. The overall targeted outcome of this study is to find information regarding policies and the implementation of the blue economy in the development of marine and coastal tourism, as well as blue economy activities carried out by tourism enthusiasts, the community, and stakeholders. The research findings indicate that the implementation of the Blue Economy in Gili Gede still faces various obstacles, reflecting a gap between the concept and field practice. Socialization and supervision of the fishing ban are not yet evenly distributed, so there are still fishermen from outside the village who violate the protection zone. Additionally, waste management at the community level is not yet optimal because an integrated management system is not available; some residents still burn waste or dispose of it in holes in the ground, which has the potential to pollute the environment. Capacity disparities between the community and tourism operators are also evident, with some hotels having implemented good management standards, while residents are still constrained by facilities, education, and infrastructure support.

Keywords: *implementation, blue economy, coastal tourism, sustainable*

PENDAHULUAN

Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami perubahan iklim secara nyata karena berdasarkan data BMKG menyatakan bahwa perubahan suhu udara seperti panas yang terasa lebih menyengat dan curah hujan yang datang dengan tidak menentu. Oleh karena itu, penting untuk dapat memberikan ruang dan peran serta masyarakat, dalam hal ini masyarakat pesisir (BMKG NTB, 2022). Dokumen Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim 2020-2045 memaparkan bahwa Nusa Tenggara Barat (NTB) masuk dalam 10 Provinsi dengan potensi kerugian ekonomi tertinggi akibat perubahan iklim terutama di sektor pertanian (BAPPENAS, 2021a). Perubahan iklim dapat mempengaruhi sistem pangan dalam beberapa cara mulai dari efek langsung pada produksi tanaman (misalnya perubahan curah hujan yang menyebabkan kekeringan atau banjir, atau suhu yang lebih hangat atau lebih dingin yang menyebabkan perubahan panjang musim tanam), hingga perubahan pasar, harga pangan dan infrastruktur rantai pasokan (Gregory PJ, Ingram JS dan Brklacich M, 2005). Salah satu upaya untuk bertahan dari krisis perubahan iklim adalah menciptakan ketahanan iklim yang tangguh dengan mengoperasionalkan potensi sumber daya tanpa mengesampingkan aspek keberlanjutan. Salah satu daerah yang telah menerapkan konsep ekonomi biru adalah Gili Gede.

Masyarakat di daerah ini telah menerapkan ekonomi biru dalam aspek ekonomi, sosial, dan pariwisata. Sebagai daerah pesisir, sebagian besar masyarakat mengandalkan sektor bahari untuk penghidupannya dengan tetap menjaga nilai-nilai dan norma yang telah diyakini sejak dulu. Misalnya pembatasan zona penangkapan ikan dan area konservasi terumbu karang, proteksi pada hutan mangrove, mitigasi bencana, aturan waktu penangkapan hasil laut, manajemen sampah, dan penggunaan energi untuk transportasi. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung produksi dan perekonomian di sektor kelautan dan perikanan serta mampu menciptakan pariwisata

yang berkelanjutan. Namun, ekonomi biru di Gili Gede juga menghadapi tantangan dalam penerapannya. Sebagai poros pariwisata di barat daya Pulau Lombok, daerah ini rentan dengan pengembangan pariwisata yang masif sehingga merubah lanskap wilayah yang seharusnya zona hijau menjadi area wisata. Maraknya wisatawan yang datang mengancam gaya hidup dan perilaku sosial budaya dari perspektif konservasi ke orientasi material. Hal ini juga berkorelasi dengan tantangan lingkungan yang dihadapi yaitu management sampah. Masyarakat dan pelaku industri pariwisata telah mengembangkan manajemen dalam pengelolaan sampah. Permasalahan inilah yang menjadi urgensi dalam penelitian ini mengingat peran ekonomi biru sangat penting bagi kesejahteraan dan pariwisata berkelanjutan di Gili Gede.

Langkah awal penerapan ekonomi biru di NTB berfokus utama pada komoditas rumput laut tahun 2015. Pemerintah berkonsentrasi pada sektor unggulan ini untuk memperkuat investasi di bidang industri rumput laut dari hulu hingga hilir. *Blue economy* (ekonomi biru) merupakan salah satu alternatif penghidupan masa depan umat manusia ditengah ancaman perubahan iklim yang kian masif. Desa pesisir merupakan wilayah yang paling terdampak perubahan iklim, sama halnya dengan Desa Gili Gede Indah, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Perubahan iklim memberikan dampak paling signifikan pada aspek sosial, budaya, ekonomi, dan kesehatan. Sebagai salah satu upaya mengatasi hal tersebut, masyarakat melakukan ketahanan iklim dengan mengembangkan *blue economy*.

Pulau Gili Gede di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, memiliki potensi pariwisata pesisir berupa perairan laut yang relatif tenang, ekosistem terumbu karang dan lamun, serta kehidupan sosial budaya masyarakat nelayan. Meskipun demikian, perkembangan pariwisata di pulau ini masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya pengelolaan ekosistem pesisir, belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam rantai nilai pariwisata, serta isu tata kelola pemanfaatan ruang pesisir. Kajian ini memberikan batasan pendorong Ekonomi Biru di pulau tersebut antara lain perikanan, mangrove, energi ramah lingkungan, dan pariwisata bahari. Penelitian sebelumnya lebih banyak menekankan pada aspek ekonomi biru di sektor kelautan. Meskipun NTB memiliki perairan yang luas, wilayah pesisir, dan kondisi geografis yang strategis, sektor kelautan seharusnya menjadi sektor dominan yang menopang perekonomiannya. Namun kemiskinan masih menjadi isu krusial pada masyarakat pesisir. Lebih dari 50% penduduk miskin NTB tinggal di daerah pesisir mulai dari Ampenan, Sekotong, Awang, Tanjung Luar, dan Sape (suara NTB, 2025).

Pengembangan Ekonomi Biru ditengarai dapat mengubah sektor maritim menjadi dasar pembangunan ekonomi dan pelestarian alam. Misalnya di Lombok Timur, hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi perairan Teluk Sereweh sangat cocok untuk budidaya rumput laut. Daya dukung untuk sistem long line adalah 93,3 ha dan untuk sistem rakit apung adalah 142,2 ha. Aspek ekonomi biru dapat menciptakan efek berganda yang memungkinkan munculnya peluang diversifikasi mata pencarian, misalnya ekowisata. Adapun tantangan pengembangan ekonomi biru khususnya di Pulau Lombok antara lain menurunnya habitat terutama rumput laut,

terumbu karang dan mangrove. Hal ini dikarenakan tingginya tekanan ekonomi yang menyebabkan orang terlibat dalam eksploitasi sumber daya perikanan. Temuan lain (Wardhana) menunjukkan bahwa ekonomi biru belum bergerak progresif, bagi para pelaku, ekonomi biru masih mengalami kesulitan. (Erlania dan Radiarta, 2015; Zamroni et.al, 2018; Wardhana et.al, 2023).

Blue economy atau yang dikenal sebagai ekonomi biru merupakan kajian baru yang menjadi harapan alternatif dalam pengelolaan sektor kelautan dan pesisir. Konsep blue economy beririsan dengan aspek lainnya yang saling terkoneksi misalnya pariwisata, energi terbarukan, perikanan, pertanian, dan transportasi kemaritiman. Istilah 'ekonomi biru' secara luas berkaitan dengan ekonomi laut yang berkelanjutan – kegiatan ekonomi yang terkait dengan laut, lautan, dan wilayah pesisir – yang memungkinkan penggunaan sumber daya sambil menjaga kesehatan ekosistem laut (Martínez-Vázquez, 2021; Mc Bain, 2024). Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi konsep *blue economy* dengan pariwisata pesisir pada konteks pulau kecil berbasis komunitas, khususnya di Pulau Gili Gede. Penelitian ini tidak hanya menekankan aspek lingkungan, tetapi juga mengaitkannya dengan tata kelola dan distribusi manfaat ekonomi lokal, sehingga menghasilkan kerangka konseptual yang aplikatif bagi wilayah pulau kecil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif menurut berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Moleong, 2019). Sementara pendekatan studi kasus dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu atau lebih orang (Sugiyono, 2019). Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus peneliti mendapat pemahaman mendalam implementasi konsep blue ekonomi Dalam Pengembangan Pariwisata Pesisir Berkelanjutan Di Pulau Gili Gede. Asumsi bahwa kasus-kasus yang terjadi di lokasi penelitian merupakan hal spesifik yang tidak ditemukan di lokasi lain.

Untuk menjaga objektivitas penelitian, peneliti melakukan observasi dengan mengamati aktivitas masyarakat Pulau Gili Gede baik aktivitas sosial, budaya, maupun pariwisata. Data sekunder berasal dari berbagai sumber, seperti artikel, buku, jurnal ilmiah, dan data pendukung sebagai referensi untuk penelitian. Fokus Grup Diskusi (FGD), observasi, dokumentasi, dan wawancara adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD), para informan diundang untuk berbicara secara terarah semi-informal dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur yang berkaitan dengan bagaimana konsep ekonomi biru dapat diterapkan dalam pariwisata berkelanjutan. Informan penelitian dipilih dengan metode purposive, dengan batasan-batasan yang telah ditentukan sesuai dengan rumusan masalah yaitu ekonomi biru dan pariwisata berkelanjutan (Moleong,

2019). Informan penelitian berjumlah 13 orang berasal dari nelayan, pengusaha wisata, ibu rumah tangga, staf desa, dan komunitas. Peneliti menggunakan teknik analisis data interaktif, seperti kondensasi, display, dan penarikan kesimpulan, untuk menganalisis data penelitian. Selanjutnya, data diuji validitasnya dengan triangulasi waktu, metode, dan sumber (Miles, Huberman, Saldana, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pulau Gili Gede merupakan pulau terbesar di Kecamatan Sekotong yang berada sekitar 500 meter di sebelah barat laut Pulau Lombok. Pulau ini memiliki satu desa yaitu Desa Gili Gede Indah dan masuk dalam Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat secara administratif. Letak koordinatnya sekitar 8°44'18" LS dan 115°53'12" BT. Berada di perairan selatan Lombok, Gili Gede menghadap ke Selat Lombok di sebelah utara dan laut lepas di sebelah selatan. Wisatawan biasanya menyeberang dengan perahu dari dermaga Tembowong atau Temeram yang memakan waktu sekitar sepuluh hingga lima belas menit tergantung destinasi. Di sekitar Gili Gede juga terdapat beberapa gili (pulau kecil) lain yang sering dikunjungi wisatawan untuk snorkeling, seperti Gili Layar, Gili Rengit, dan Gili Asahan.

Lima dusun membentuk Desa Gili Gede secara administratif yaitu Dusun Gili Gede, Dusun Gedang Siang, Dusun Labuhan Cenik, Dusun Tanjungan, dan Dusun Orong Bukal. Selain menjadi pusat aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, kelima dusun ini juga menjadi tempat pertumbuhan pariwisata bahari. Desa Orong Bukal memiliki konsentrasi pengembangan wisata lebih padat dibandingkan dusun yang lain dilihat dari jumlah hotel, penginapan, dan homestay.

Pembahasan penelitian ini menekankan pada empat aspek yang menggambarkan dinamika antara peluang ekonomi biru dan tantangan nyata di lapangan. Aspek tersebut mencakup aspek ekologis, aspek sosial dan budaya, aspek ekonomi dan tata kelola kelembagaan. Pada bagian selanjutnya, masing-masing tema dibahas secara rinci dengan mengutip langsung pernyataan informan untuk memperkuat temuan penelitian.

Konservasi Ekosistem untuk Mendukung Pariwisata

Konservasi merupakan salah satu aspek penting dalam penerapan konsep *blue economy*. Di Gili Gede, upaya menjaga keberlanjutan lingkungan sebenarnya sudah pernah dilakukan, namun sifatnya masih sporadis dan bergantung pada inisiatif dari pihak luar, terutama lembaga pendidikan maupun program pemerintah. Penanaman mangrove pernah dilakukan oleh mahasiswa dengan menggandeng masyarakat pada saat program KKN. Penanaman mangrove hanya berlangsung pada saat program berjalan, tanpa tindak lanjut yang berkelanjutan dari masyarakat maupun pemerintah desa. Artinya, kesadaran untuk melanjutkan program tersebut masih lemah, dan keberlanjutan konservasi lebih bersifat seremonial.

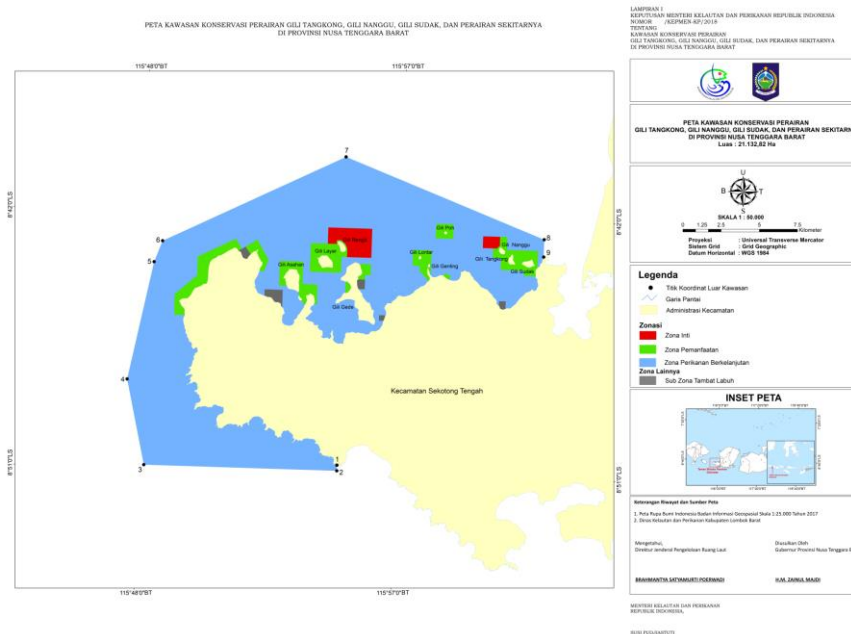
Hutan mangrove di Desa Orong Bukal merupakan contoh nyata pemanfaatan sumber daya pesisir yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekologis, tetapi

juga dikembangkan untuk mendukung kegiatan wisata berbasis ekonomi biru. Secara alami, mangrove memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir, seperti melindungi pantai dari abrasi dan gelombang laut, menjadi habitat serta tempat pembesaran berbagai biota laut, menyerap karbon, dan menjaga kualitas perairan. Fungsi ekologis ini menjadi fondasi utama dalam pengelolaan kawasan mangrove di desa tersebut agar tetap lestari dan berkelanjutan. Namun, hutan mangrove menghadapi kerentanan dengan banyaknya sampah yang tersangkut. Sampah yang banyak ditemukan di kawasan hutan mangrove umumnya berasal dari material yang terbawa arus laut. Saat pasang naik atau ketika arus laut menguat, berbagai jenis sampah seperti plastik, botol, dan sisa kemasan terbawa menuju pesisir. Struktur akar mangrove yang rapat dan menjalar kemudian berfungsi seperti jaring alami yang menahan benda-benda tersebut. Akibatnya, sampah yang terbawa arus tersangkut di antara akar-akar mangrove dan menumpuk dari waktu ke waktu. Penumpukan sampah di kawasan mangrove tidak selalu berasal dari aktivitas masyarakat setempat, melainkan merupakan dampak dari pergerakan arus laut yang membawa limbah dari wilayah lain.

Konservasi mangrove tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, nmaun juga dari pihak hotel yang ada di pesisir pantai Dusun Orong Bukal, yaitu Kokomo Resort. Pihak hotel berkontribusi secara aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan melakukan kegiatan pembersihan sampah di pesisir pantai dan area hutan mangrove. Keterlibatan ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan yang membantu mengurangi pencemaran laut serta menjaga kualitas dan keindahan kawasan wisata mangrove agar tetap menarik dan nyaman dikunjungi.

Bentuk konservasi lain yang dilakukukan oleh masyarakat, pokdarwis dan pemerintah desa yaitu *awig-awig* atau peraturan perlindungan terumbu karang. Luas terumbu karang di wilayah ini (Gili Gede, Takad Anyaran, Gili Rengit, Gili Layar, Gili Asahan, dan Tenggolong) adalah 288,8 ha; sedangkan non-terumbu karang seluas 272,4 ha. Tipologi habitat terumbu karang di Gili Gede, Takad Anyaran, Gili Rengit, Gili Layar, Gili Asahan, dan Tenggolong (Ampou et.al, 2024). Untuk menjaga kelestariannya, masyarakat bersama pengelola wisata dan aparat desa menyusun peraturan konservasi yang bertujuan melindungi terumbu karang dari kerusakan akibat aktivitas manusia. Salah satu aturan utama yang diterapkan adalah larangan bagi wisatawan yang melakukan kegiatan menyelam maupun snorkeling untuk menginjak atau berdiri di atas terumbu karang.

Gambar 1 pemetaan area konservasi TWP Gili Nada (termasuk Gili Gede dan Gili Layar) oleh KKP



Sumber: KKP

Peraturan ini lahir dari kesadaran bahwa sentuhan dan pijakan manusia, meskipun terlihat sepele, dapat menyebabkan kerusakan serius pada terumbu karang yang membutuhkan waktu sangat lama untuk tumbuh kembali. Wisatawan diwajibkan menjaga jarak dengan terumbu karang, tidak berpijak pada terumbu karang, menggunakan teknik berenang yang benar, serta mengikuti arahan pemandu lokal selama beraktivitas di laut. Masyarakat setempat dan pelaku usaha wisata (boatman dan guide) juga berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada wisatawan mengenai pentingnya terumbu karang sebagai habitat biota laut dan pelindung alami pesisir.

Masyarakat Desa Gili Gede telah memiliki kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian lingkungan laut, khususnya di sekitar spot wisata bahari yang menjadi sumber penghidupan jangka panjang bagi desa. Kesadaran tersebut diwujudkan melalui peraturan desa yang melarang aktivitas penangkapan ikan di area tertentu yang ditetapkan sebagai kawasan wisata bahari. Larangan ini bertujuan melindungi ekosistem laut, menjaga keindahan bawah laut, serta memastikan keberlanjutan pariwisata yang menjadi salah satu tumpuan ekonomi masyarakat Gili Gede.

Namun dalam praktiknya, pelanggaran terhadap peraturan tersebut masih terjadi. Aktivitas penangkapan ikan justru dilakukan oleh masyarakat dari luar Pulau Gili Gede yang memasuki area larangan. Kehadiran nelayan dari luar ini didorong oleh alasan ekonomi, di mana kebutuhan untuk memenuhi penghasilan menjadi dalih utama mereka tetap menangkap ikan di kawasan yang seharusnya dilindungi. Kondisi ini

menimbulkan dilema bagi masyarakat lokal, karena meskipun kawasan tersebut berada dalam wilayah pengelolaan desa, pelanggaran tetap berlangsung.

Masyarakat Gili Gede sebenarnya telah berupaya melakukan pendekatan persuasif dengan memberikan teguran dan imbauan kepada para pelaku agar menghormati peraturan yang berlaku. Teguran tersebut disampaikan sebagai bentuk upaya menjaga ketertiban sekaligus menghindari tindakan represif. Namun, upaya ini sering kali tidak diindahkan, karena para pelaku tetap berpegang pada alasan ekonomi sebagai pembenaran atas aktivitas penangkapan ikan di area wisata bahari.

Di sisi lain, masyarakat Gili Gede memilih untuk tidak memperpanjang persoalan tersebut ke ranah konflik yang lebih besar. Kekhawatiran akan munculnya ketegangan sosial dan konflik antarwilayah membuat masyarakat bersikap lebih berhati-hati. Sikap ini mencerminkan kondisi sosial masyarakat pesisir yang berusaha menjaga harmoni, meskipun dihadapkan pada tantangan serius dalam penegakan aturan konservasi. Situasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan sumber daya laut tidak hanya berkaitan dengan aturan formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial, tekanan ekonomi, dan relasi antar komunitas pesisir.

Managemen Sampah

Sampah menjadi persoalan paling nyata yang dihadapi Desa Wisata Gili Gede. Hampir semua informan menyinggung persoalan ini, baik yang berasal dari aktivitas masyarakat maupun dari kunjungan wisatawan. Persoalan sampah dianggap penting karena berhubungan langsung dengan citra pariwisata, kenyamanan wisatawan, serta keberlanjutan ekosistem laut. Temuan penelitian Wijayanti dkk pada tahun 2024 menunjukkan Interaksi ketergantungan dengan daratan utama meningkat untuk konsumsi pangan yang tidak dihasilkan di Gili Gede. Hal ini meningkatkan volume sampah, sedangkan di Gili Gede sendiri manajemen sampah masih minim. Masyarakat di Gili Gede hingga saat ini belum memiliki sistem manajemen sampah yang terstruktur dan berkelanjutan. Ketiadaan fasilitas pengelolaan, seperti tempat pembuangan sementara, akses pengangkutan, maupun sistem pemilahan, membuat warga harus mengelola sampah secara mandiri dengan cara-cara sederhana. Akibatnya, sebagian sampah rumah tangga sering kali dibakar di halaman atau kebun sekitar rumah, sementara sebagian lainnya dibuang ke dalam lubang-lubang tanah yang digali khusus untuk menampung limbah. Praktik ini dilakukan bukan karena kurangnya kesadaran lingkungan, tetapi lebih karena keterbatasan infrastruktur dan belum adanya dukungan kelembagaan yang memadai. Namun demikian, metode pengelolaan sampah seperti pembakaran terbuka dan pembuangan ke lubang tanah berpotensi menimbulkan pencemaran udara, mencemari tanah, serta mengganggu estetika kawasan wisata.

Salah satu pelaku usaha wisata yang telah menerapkan manajemen sampah mandiri adalah Kokomo. Hotel Kokomo di Gili Gede telah menerapkan praktik manajemen sampah yang lebih terstruktur dibandingkan sebagian besar masyarakat di pulau tersebut. Sebagai bagian dari komitmennya terhadap pariwisata berkelanjutan, pihak hotel tidak membuang atau membakar sampah di kawasan pulau. Sebaliknya,

semua sampah yang dihasilkan dari kegiatan operasional hotel dikumpulkan, dipilah, dan kemudian dibawa ke daratan utama untuk diproses lebih lanjut. Langkah ini dilakukan karena Gili Gede belum memiliki fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, sehingga pengangkutan keluar pulau menjadi solusi paling bertanggung jawab secara lingkungan. Upaya Hotel Kokomo ini tidak hanya membantu menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekitar, tetapi juga menjadi contoh positif bagi pelaku usaha lainnya dalam mengelola limbah secara berkelanjutan dan menjaga kualitas destinasi wisata Gili Gede. Pelaku usaha wisata di sekitar resort ini juga melakukan komitmen sama dengan pemilahan sampah. Hal ini seperti penuturan ketua pokdarwis dalam wawancara berikut. Wafa menuturkan bahwa pengelolaan sampah sebagian besar masih bergantung pada pihak swasta, dalam hal ini salah satu investor:

“Ada petugas sampah, dua orang, digaji sama Kokomo. Mereka bersihin dusun, ngambil sampah ke rumah-rumah. Ada juga warga lokal Gili Gede yaitu Bang Alec, kami anggap dia pahlawan. Tanpa support siapa pun, dia bersihkan Gili Gede. Rela panas-panasan, tapi nggak ada penghargaan sama sekali.” (Wawancara 28 Agustus 2025)

Selain dukungan dari pihak swasta, terdapat inisiatif pribadi yang muncul dari warga lokal. Kutipan tersebut memperlihatkan adanya kepedulian individu yang kuat terhadap masalah sampah. Namun, inisiatif ini belum mendapat dukungan memadai dari masyarakat maupun pemerintah desa, sehingga kesannya berjalan sendiri tanpa menjadi gerakan bersama. Hal ini menunjukkan lemahnya kelembagaan lokal dalam mendorong partisipasi kolektif. Di sisi lain, kebiasaan buruk masyarakat masih menjadi kendala serius. Masih ada warga yang membuang limbah ikan ke laut. Perilaku tersebut tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menimbulkan keluhan wisatawan. Artinya, kesadaran masyarakat terhadap dampak jangka panjang dari sampah masih rendah, sementara orientasi yang muncul lebih pada mencari jalan paling praktis tanpa memperhitungkan konsekuensi.

Praktik pengelolaan sampah oleh resort, masyarakat lokal dan komunitas tersebut mencerminkan prinsip ekonomi biru, yaitu pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara bertanggung jawab tanpa merusak lingkungan. Dengan menjaga kebersihan dan kesehatan ekosistem laut, pihak hotel turut memastikan keberlanjutan pariwisata, kesejahteraan masyarakat sekitar, serta kelangsungan nilai ekonomi yang bergantung pada laut. Melalui komitmen ini, hotel tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi dari pariwisata, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga kelestarian sumber daya laut sebagai modal utama pembangunan berkelanjutan.

Perikanan dan Akuakultur

Selain pariwisata, sektor perikanan masih menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian besar masyarakat Gili Gede. Laut di sekitar pulau tidak hanya menjadi sumber makanan, tetapi juga penyedia komoditas ekonomi yang penting. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya laut harus dijalankan dengan tetap memperhatikan

kelestariannya. Informan dari pihak pemerintah desa menjelaskan bahwa masyarakat memiliki pemahaman dasar mengenai jenis ikan yang boleh ditangkap dan mana yang harus dijaga keberadaannya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris Desa:

“Ikan hias nggak boleh ditangkap. Warga sudah tahu mana ikan bernilai ekonomi. Yang penting nggak pakai bom, karena itu merusak.”
(Wawancara 28 Agustus 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ada kesadaran lokal terkait larangan menangkap ikan hias yang bernilai ekologi tinggi dan lebih bermanfaat jika dibiarkan hidup untuk mendukung wisata bahari, khususnya kegiatan snorkeling dan diving. Masyarakat juga memahami bahwa penggunaan alat tangkap berbahaya, seperti bom atau bahan kimia, akan merusak ekosistem laut secara permanen.

Meskipun demikian, tantangan dalam sektor perikanan masih ada. Pengawasan terhadap praktik penangkapan ikan belum berjalan maksimal, sehingga kemungkinan terjadinya pelanggaran tetap terbuka. Tekanan ekonomi juga membuat sebagian nelayan memilih cara cepat untuk mendapatkan hasil lebih banyak, meski berpotensi merusak lingkungan. Hal ini memperlihatkan adanya tarik-menarik antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dengan kepentingan menjaga ekosistem jangka panjang.

Selain itu, potensi pengembangan akuakultur (budidaya laut) sebenarnya cukup besar di Gili Gede, misalnya untuk budidaya rumput laut atau keramba ikan. Namun, sejauh ini belum terlihat upaya serius dari masyarakat maupun pemerintah desa untuk mengembangkan sektor tersebut secara berkelanjutan. Padahal, jika dikelola dengan baik, akuakultur dapat menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan sekaligus menambah sumber pendapatan masyarakat. Pada dasarnya masyarakat Gili Gede sudah memiliki pengetahuan dasar mengenai pentingnya menjaga sumber daya perikanan. Namun, praktik di lapangan masih menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan dan tekanan ekonomi. Pengembangan akuakultur berkelanjutan dapat menjadi peluang yang perlu dipertimbangkan untuk mendukung penerapan konsep blue economy di masa mendatang.

Penggunaan Energi Ramah Lingkungan

Perkembangan infrastruktur energi di Gili Gede menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung aktivitas masyarakat sekaligus pariwisata. Sebelum adanya jaringan listrik, masyarakat mengandalkan genset yang hanya beroperasi beberapa jam pada malam hari. Hal ini tentu sangat terbatas, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha pariwisata. Sekretaris Desa menjelaskan:

“Dulu pakai genset, hidupin jam 6 sore sampai jam 12 malam. Sekarang sudah nggak pakai lagi.” (Wawancara 28 Agustus 2025)

Pernyataan ini menunjukkan adanya perubahan signifikan sejak tahun 2018 ketika listrik mulai masuk secara menyeluruh. Kehadiran listrik tidak hanya memudahkan aktivitas sehari-hari, tetapi juga mendukung perkembangan pariwisata,

karena wisatawan membutuhkan fasilitas yang nyaman, termasuk akses listrik untuk penerangan, pendingin ruangan, dan kebutuhan komunikasi. Selain penggunaan listrik dari PLN, masyarakat juga mulai mengenal penggunaan sepeda listrik sebagai alat transportasi ramah lingkungan. Ketua Pokdarwis menuturkan:

“Sepeda listrik semua dipakai di sini. Tapi solar cell udah nggak ada, kita full pakai listrik.” (Wawancara 28 Agustus 2025)

Sepeda listrik dipilih karena lebih praktis, hemat energi, dan sesuai dengan kondisi jalan di pulau yang relatif kecil. Kehadiran sepeda listrik juga memberi kesan positif bagi wisatawan, karena lebih ramah lingkungan dibandingkan kendaraan bermotor berbahan bakar minyak. Namun, meskipun ada perkembangan menuju penggunaan energi ramah lingkungan, kesadaran ekologis masyarakat sebenarnya belum terlalu tinggi. Pergeseran dari genset ke listrik dan dari motor ke sepeda listrik lebih didorong oleh faktor kenyamanan dan efisiensi, bukan oleh kesadaran menjaga lingkungan. Hal ini juga terlihat dari keterangan Wafa mengenai tidak adanya lagi penggunaan panel surya (solar cell). Padahal, solar cell dapat menjadi alternatif energi terbarukan yang sesuai dengan kondisi tropis dan potensi sinar matahari yang melimpah.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa masyarakat Gili Gede sudah mulai beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan, baik melalui listrik maupun penggunaan sepeda listrik. Akan tetapi, pergeseran ini belum sepenuhnya didorong oleh semangat green energy, melainkan oleh kebutuhan praktis sehari-hari. Peralihan masyarakat Gili Gede ke penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan, seperti pemanfaatan listrik dan sepeda listrik, menunjukkan adanya dinamika awal menuju praktik pembangunan yang selaras dengan konsep blue economy. Walaupun sepeda listrik dipilih bukan semata-mata karena bebas emisi, tetapi karena lebih ringan, tidak bising, dan mudah digunakan untuk aktivitas harian. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku energi di tingkat masyarakat lebih banyak didorong oleh kebutuhan fungsional dibandingkan nilai keberlanjutan. Artinya, meskipun ada langkah positif dalam pemanfaatan energi, peluang untuk mengembangkan sumber energi terbarukan secara berkelanjutan masih terbuka.

PENUTUP

Masyarakat Gili Gede pada dasarnya telah menunjukkan upaya awal dalam menerapkan prinsip ekonomi biru sebagai strategi untuk menjaga *tourism sustainability* walaupun prakteknya belum sepenuhnya maksimal. Berbagai praktek seperti pengaturan ruang laut, perlindungan kawasan wisata bahari, pengelolaan lingkungan, serta peralihan bertahap menuju penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan mencerminkan adanya kesadaran bahwa sektor pariwisata sangat bergantung pada kelestarian ekosistem laut dan pesisir. Temuan penelitian ini juga memperlihatkan adanya gap antara konsep blue economy yang ideal dengan realitas di lapangan.

Meskipun Gili Gede memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata berbasis kelautan, rendahnya kesadaran lingkungan, lemahnya partisipasi, dan ketimpangan distribusi manfaat membuat penerapan blue economy masih bersifat parsial dan berbenturan dengan kepentingan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ampou, E.E., Rahmania, R., Hanintyo, R., Pradisty, N.A., Arinda, N., Pranowo, W.S.,(2024). The Potential Use Of Coral Reef Habitat Mapping In Supporting Ecotourism Development In Lombok, Indonesia. *International Journal Conservation Science* Vol 15 (4). 1921-1930
- BPS NTB. (2024). *Profil Kemiskinan NTB, Maret 2024*. <https://ntb.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/1008/ntb--maret-2024-profil-kemiskinan.html>
- Erlania dan Radiarta, I. N. (2015). Pengembangan Budidaya Rumput Laut: Implikasi Penerapan Blue Economy Di Teluk Sereweh, Nusa Tenggara Barat. *Media Akuakultur* Vol. 10 No. 2 97-101. DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/ma.10.2.2015.97-101>
- Gregory PJ, Ingram JS, Brklacich M. Climate change and food security. *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci.* (2005) Nov 29;360(1463):2139-48. doi: 10.1098/rstb.2005.1745.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2023). *Indonesia Blue economy Roadmap*. Available in https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Unit_Kerja/Dir%20Industri%2C%20Ekonomi%20dan%20Kreatif/Dummy_Indonesia%20Blue%20Economy%20Roadmap_Ebook.pdf
- Martínez-Vázquez, R.M., Milán-García, J. & de Pablo Valenciano, J. Challenges of the Blue economy : Evidence And Research Trends. *Environ Sci Eur* 33, 61 (2021). <https://doi.org/10.1186/s12302-021-00502-1>
- McBain, Darian. (2024). *What is the blue economy?*. <https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/explainers/what-is-the-blue-economy/>
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2015. *Action Research Methods*. Vol. 4 (2024): Proceedings of the National Seminar of the Department of PGSD FIP UNP in 2015 vol 1(1).
- Wijayanti, I., Salsabila, S., Hilmi, F., Hakim, L.D.R. (2025). Perubahan Iklim Dan Konsekuensinya: Potret Kerentanan Pangan Masyarakat Pesisir Gili Gede Indah Akibat Perubahan Iklim. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya* Vol. 27(1). <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v27i1.1418>
- Zamroni, A., Nurlaili dan Witomo, C. M. (2018). Peluang Penerapan Konsep Blue Economy Pada Usaha Perikanan Di Kabupaten Lombok Timur. *Buletin Ilmiah "MARINA" Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* Vol. 4 No. 2 Tahun 2018: 39-44